

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2021



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2020

Jl. Merdeka No. 185 Pangandaran Telp/Fax (0265) 631185 Kode Pos 46393



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Merdeka No. 185 Pangandaran Telp/Fax (0265) 631185 Kode Pos 46396

Email : dukcapilpnd@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/25-Dukcapil/2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu disusun Rencana Ranwal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tentang Pengesahan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 57);
31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana (Renja) Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun

Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaram (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 31 Agustus 2020

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN,



UKI, S.Sos., M.M

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19700312 199803 2 004

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pangandaran;
2. Wakil Bupati Pangandaran;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran;
5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk Tahun anggaran 2021.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam prosesnya selalu mengalami hambatan serta keterbatasan, harapan kami semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik untuk tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini, kami sadari masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta kami mengharap ada masukan ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan peningkatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini dapat menjadi media informasi yang berguna serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

Pangandaran, 31 Agustus 2020

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN



UKI, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700312 199803 2 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan SKPD	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	42
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan	50
BAB V Penutup	58
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renja SKPD Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2021, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD).

Renja SKPD adalah dokumen rancangan awal perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);

31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 57);
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62).
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pangandaran yang telah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan untuk tahun 2021 yang merupakan dokumen Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk periode 1 (satu) tahun dimaksudkan untuk menguraikan kegiatan-kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran secara sistematis mulai dari sasaran dan pembiayaan sesuai program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun, yang selanjutnya dijadikan sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahunn 2021, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen SKPD, Renja K/L dan Renja Provinsi, dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistem Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Menjelaskan capaian kinerja layanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra SKPD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGS (Millenium Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

2.4 Penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Saran Renja SKPD

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan saran target kinerja Renstra SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan SKPD pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Renja SKPD, penegasan komitmen SKPD terhadap pelaksanaan Renstra SKPD dan RPJMD,



serta penegasan Renja SKPD sebagai acuan penyusunan RKA SKPD
pada tahun rencana.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang meliputi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yaitu Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai Dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun 2019 Dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp.293.515.000.- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.288.787.858.- atau 98.39% yang diimplementasikan ke dalam 13 (tiga belas) Kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp.100.000,- dengan Realiasi Anggran Sebesar Rp.60.000,- atau 60% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.210.990.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.206.924.258,- atau 98.07% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.2.930.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.643.600,- atau 90.23% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan sebanyak 6 Unit.
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.16.100.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.100.000 atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan.
- e. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.400.000,- atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran selama 12 bulan.

- f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.16.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.200.000 atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan.
- g. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.16.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.200.000 atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan jasa pengamanan kantor selama 12 bulan.
- h. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.295.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.295.000 atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan.
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.200.000 atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.
- j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.200.000 atau 100% dengan output dari

kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan.

- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.800.000 atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan.
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan jumlah anggaran sebesar Rp.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.600.000 atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan.
- m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.865.000 atau 95.50% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan
- n. Penyediaan Jasa Pengemudi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.400.000 atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan jasa pengemudi selama 12 bulan.

2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp.49.150.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.47.038.000,- atau 95.70% yang diimplementasikan ke dalam 4 (empat) Kegiatan yaitu sebagai berikut :*

- a. *Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp.4.000.000,- dengan Realiasi Anggran Sebesar Rp.4.000.000,- atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sebanyak 1 set.*
- b. *Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp.5.000.000,- dengan Realiasi Anggran Sebesar Rp.5.000.000,- atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 unit.*
- c. *Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp.23.400.000,- dengan Realiasi Anggran Sebesar Rp. 23.220.000 atau 99.23% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan pemeliharaan secara rutin sebanyak 6 unit.*
- d. *Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp.16.750.000,- dengan Realiasi Anggran Sebesar Rp.14.818.000 atau*

88.47% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan gedung kantor dinas yang disediakan pemeliharaan secara rutin sebanyak 21 unit.

3. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp.72.950.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.71.750.000,- atau 98.36% yang diimplementasikan ke dalam 6 (enam) Kegiatan yaitu sebagai berikut :*

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp.500.000,- dengan Realiasi Anggran Sebesar Rp.500.00,- atau 100% dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 Dokumen.
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp.500.000,- dengan Realiasi Anggran Sebesar Rp.500.000,- atau 100% dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah buku laporan keuangan semester sebanyak 2 Dokumen.
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.500.000,- dengan realisasi Rp.500.00,- atau 100% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan akhir tahun sebanyak 1 dokumen.

- d. Penyusunan Program Dan Kegiatan SKPD, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.24.650.000,- dengan realisasi Rp.24.250.000,- atau 98.38%% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun sebanyak 5 dokumen.
- e. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.23.400.000,- dengan realisasi Rp.23.000.000,- atau 98.29% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaporan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 12 laporan.
- f. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.23.400.000,- dengan realisasi Rp.23.000.000,- atau 98.29% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaporan pengelolaan barang daerah sebanyak 12 laporan.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp.471.850.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.468.971.750,- atau 99.39% yang diimplementasikan ke dalam 10 (sepuluh) Kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.444.313.000,- dengan realisasi Rp.444.037.000 atau 99.94% dengan output

dari kegiatan ini adalah Jumlah lokasi pengembangan dan pengoprasian SIAK sebanyak 1 kabupaten.

b. Pemeliharaan Arsip Catatan Sipil Secara Manual dan Digital dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.8.000.000,- dengan realisasi Rp.7.970.000 atau 99.63% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah arsip yang dipelihara sebanyak 6.864 Arsip.

c. Pengelolaan System Informasi Adiministrasi Kependudukan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.66.200.000,- dengan realisasi Rp.66.140.000 atau 99.91% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah SIAK yang dikelola sebanyak 2 jenis.

d. Pelayanan Dokumen Identitas Penduduk dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.208.800.000,- dengan realisasi Rp.208.800.000 atau 100.00% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah identitas kependudukan yang diterbitkan sebanyak 79.458 Dokumen

e. Pelayanan Pindah Datang Penduduk dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.34.800.000,- dengan realisasi Rp.34.800.000 atau 100.00% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pindah datang yang diterbitkan sebanyak 4.614 dokumen

f. Pendataan Penduduk dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.17.400.000,- dengan realisasi Rp.17.400.000

atau 100.00% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen data kependudukan sebanyak 2 dokumen

- g. Pelayanan Akta Kelahiran dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.69.600.000,- dengan realisasi Rp.69.600.000 atau 100.00% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah penerbitan akta kelahiran 13.475 akta.
- h. Pelayanan Akta Kematian dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.17.400.000,- dengan realisasi Rp.17.400.000 atau 100.00% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah penerbitan akta kematian sebanyak 2.164 akta.
- i. Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.17.400.000,- dengan realisasi Rp.17.400.000 atau 100.00% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah penerbitan akta pencatatann akta perkawinan dan perceraian sebanyak 1 akta.
- j. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.2.250.000,- dengan realisasi Rp.2.246.750 atau 99.86% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah informasi kependudukan yang dikelola sebanyak 103 dokumen.



- k. Pengembangan Aplikasi Layanan Kependudukan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi Rp.27.215.000 atau 90.72% dengan output dari kegiatan ini adalah Jumlah aplikasi yang dibuat sebanyak1 aplikasi.



**Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kab/Kota
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran
Tahun 2019**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPd kab/kota
Sasaran : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Indikator/Target : Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target : 53,94%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kab/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Pagu DPA 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kab/kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Disuducapil Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kab/kota s/d tahun ... (%)	
		Tolak Ukur	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
2	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																
3	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	6.261.606.440	100	1.891.724.000	100	1.574.411.000	100	1.508.941.259	100.00%	79.77%	100	1.508.941.259	100%	24.10%
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	36	7.209.180	12	2.178.000	12	100.000	12	60.000	100.00%	2.75%	12	60.000	33.33%	0.83%
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	36	866.558.000	12	261.800.000	12	210.990.000	12	206.924.258	100.00%	79.04%	12	206.924.258	33.33%	23.88%
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	24	19.860.000	7	6.000.000	6	2.930.000	6	2.643.600	85.71%	44.06%	6	2.643.600	25.00%	13.31%
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	36	55.608.000	12	16.800.000	12	16.200.000	12	16.200.000	100.00%	96.43%	12	16.200.000	33.33%	29.13%
8	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan jasa pengamanan kantor	Bulan	36	55.608.000	12	16.800.000	12	16.200.000	12	16.200.000	100.00%	96.43%	12	16.200.000	33.33%	29.13%
9	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang dan administrasi perkantoran	Bulan	36	127.104.000	12	38.400.000		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	Bulan	36	164.672.500	12	49.750.000	12	4.295.000	12	4.295.000	100.00%	8.63%	12	4.295.000	33.33%	2.61%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Paket	3	124.125.000	1	37.500.000		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Bulan	36	21.846.000	12	6.600.000	12	1.200.000	12	1.200.000	100.00%	18.18%	12	1.200.000	33.33%	5.49%



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	36	21.846.000	12	6.600.000	12	1.200.000	12	1.200.000	100.00%	18.18%	12	1.200.000	33.33%	5.49%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	36	59.580.000	12	18.000.000	12	2.000.000	12	1.800.000	100.00%	10.00%	12	1.800.000	33.33%	3.02%
15	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	Bulan	36	39.720.000	12	12.000.000	12	600.000	12	600.000	100.00%	5.00%	12	600.000	33.33%	1.51%
16	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	36	231.700.000	12	70.000.000	12	3.000.000	12	2.865.000	100.00%	4.09%	12	2.865.000	33.33%	1.24%
17	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Bulan	36	99.300.000	12	30.000.000		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
17	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Bulan	36	55.608.000	12	16.800.000	12	17.400.000	12	17.400.000	100.00%	103.57%	12	17.400.000	33.33%	31.29%
17	Penyediaan Jasa Pengemudi	Jumlah waktu penyediaan jasa pengemudi	Bulan	36	71.496.000	12	21.600.000	12	17.400.000	12	17.400.000	100.00%	80.56%	12	17.400.000	33.33%	24.34%
17	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Pelayanan, Penerbitan, Sosialisasi, Pengelolaan, Peningkatan Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan	Tahun	3	4.239.765.760	1	1.280.896.000	1	1.280.896.000	1	1.220.153.401	100.00%	95.26%	1	1.220.153.401	33.33%	28.78%
Rata-rata capaian kinerja (%)												81.51%	38.95%			26.96%	11.77%
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	1.302.430.320	100	363.272.000	100	49.150.000	100	47.038.000	100.00%	12.95%	100	47.038.000	100.00%	3.61%
20	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Unit	84	604.075.000	24	182.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4.17%	2.19%	1	4.000.000	1.19%	0.66%
21	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	72	132.400.000	20	40.000.000		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
22	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Unit	25	100.000.000	-	-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Unit	6	93.580.320	2	28.272.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100.00%	17.69%	2	5.000.000	33.33%	5.34%
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit	24	214.488.000	7	64.800.000	6	23.400.000	6	23.220.000	85.71%	35.83%	6	23.220.000	25.00%	10.83%
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	Unit	125	157.887.000	21	47.700.000	21	16.750.000	21	14.818.000	100.00%	31.06%	21	14.818.000	16.80%	9.39%
Rata-rata capaian kinerja (%)												48.31%	14.46%			12.72%	4.37%
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

31	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparaturnya	%	100	46.200.000	100	21.000.000		-	-	-	0.00%	0.00%	100	-	100.00%	0.00%
32	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Stel	120	46.200.000	60	21.000.000		-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%)												0.00%	0.00%			0.00%	0.00%
Predikat kinerja												SR	SR			SR	R
34	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	381.974.000	100	115.400.000	100	71.150.000	100	71.750.000	0.00%	0%	200	71.750.000		
35	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	Dokumen	15	6.620.000	5	2.000.000	5	500.000	5	500.000	100.00%	25.00%	5	500.000	33.33%	7.55%
36	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	Dokumen	6	6.620.000	2	2.000.000	2	500.000	2	500.000	100.00%	25.00%	2	500.000	33.33%	7.55%
37	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen	3	6.620.000	1	2.000.000	1	500.000	1	500.000	100.00%	25.00%	1	500.000	33.33%	7.55%
38	Penyusunan Program Dan Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun	Dokumen	15	125.118.000	5	37.800.000	5	24.050.000	5	24.250.000	100.00%	64.15%	5	24.250.000	33.33%	19.38%
39	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Laporan	36	118.498.000	12	35.800.000	12	22.800.000	12	23.000.000	100.00%	64.25%	12	23.000.000	33.33%	19.41%
40	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi barang daerah	Laporan	36	118.498.000	12	35.800.000	12	22.800.000	12	23.000.000	100.00%	64.25%	12	23.000.000	33.33%	19.41%
Rata-rata capaian kinerja (%)												100.00%	44.61%			33.33%	13.48%
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
44	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	73	5.601.762.000	73	1.825.170.000	73	261.000.000	72	261.000.000	98.63%	14.30%	72	261.000.000	98.63%	4.66%
45	Pelayanan Dokumen Identitas Penduduk	Jumlah Identitas Kependudukan yang diterbitkan	Dokumen	549.630	753.025.000	49.105	227.500.000	49.105	208.800.000	173.154	208.800.000	352.62%	91.78%	173.154	208.800.000	31.50%	27.73%
46	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan	Dokumen	18.000	120.815.000	4.800	36.500.000	1.200	34.800.000	5.556	34.800.000	115.75%	95.34%	5.556	34.800.000	30.87%	28.80%
47	Pendataan Penduduk	Jumlah dokumen Data Penduduk	Dokumen	6	130.745.000	2	39.500.000	2	17.400.000	2	17.400.000	100.00%	44.05%	2	17.400.000	33.33%	13.31%
48	Pengadaan Mobilling Kependudukan	Jumlah Mobilling Kependudukan yang diadakan	Unit	3	3.600.000.000	1	1.200.000.000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

49	Pengadaan Perlengkapan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	Jumlah pengadaan perlengkapan perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	Paket	3	997.177.000	1	321.670.000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%)												113.67%	46.23%			32.39%	12.42%
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
44	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	53	524.800.000	53	158.550.000	53	112.400.000	52	112.370.000	98.11%	70.87%	52	112.370.000	98.11%	21.41%
50	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	Akta	342.427	239.975.000	102.857	72.500.000	102.857	69.600.000	13.172	69.600.000	12.81%	96.00%	13.172	69.600.000	3.85%	29.00%
51	Pemeliharaan Arsip Catatan Sipil Secara Manual dan Digital	Jumlah Arsip yang dipelihara	Arsip	60.000	158.880.000	20.000	48.000.000	20.000	8.000.000	12.050	7.970.000	60.25%	16.60%	12.050	7.970.000	20.08%	5.02%
52	Pelayanan Akta Kematian	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	Akta	8.280	61.235.000	2.760	18.500.000	2.760	17.400.000	2.353	17.400.000	85.25%	94.05%	2.353	17.400.000	28.42%	28.42%
53	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan dan Perkawinan yang disusun	Akta	44	64.710.500	11	19.550.000	11	17.400.000	1	17.400.000	9.09%	89.00%	1	17.400.000	2.27%	26.89%
Rata-rata capaian kinerja (%)												41.85%	73.92%			13.66%	22.33%
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
44	Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD)	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	33	857.092.000	33	153.200.000	33	98.450.000	32	95.601.750	96.97%	62.40%	32	95.601.750	96.97%	11.15%
54	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah perangkat SIKAD yang dikelola	Unit	155	369.727.000	45	111.700.000	2	66.200.000	25	66.140.000	55.56%	59.21%	25	66.140.000	16.13%	17.89%
55	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Informasi Kependudukan yang dikelola	Dokumen	309	38.065.000	103	11.500.000	103	2.250.000	100	2.246.750	97.09%	19.54%	100	2.246.750	32.36%	5.90%
56	Pengembangan Aplikasi Layanan Kependudukan	Jumlah Aplikasi yang dibuat	Aplikasi	3	99.300.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	27.215.000	100.00%	90.72%	1	27.215.000	33.33%	27.41%
56	Pengadaan Server Database Kependudukan	Jumlah server database kependudukan yang diadakan	Unit	2	350.000.000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
Rata-rata capaian kinerja (%)												63.16%	42.37%			20.46%	12.80%
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)												64.07%	37.22%			19.93%	11.02%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)												SR	SR			SR	SR

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Skpd

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pangandaran.

Berikut merupakan jumlah penduduk kabupaten pangandaran per 31 Desember 2019 :

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PANGANDARAN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Keterangan
1	PARIGI	45.165	
2	CIJULANG	28.001	
3	CIMERAK	48.461	
4	CIGUGUR	22.720	
5	LANGKAPLANCAR	51.160	
6	MANGUNJAYA	32.986	
7	PADAHERANG	69.104	
8	KALIPUCANG	38.635	
9	PANGANDARAN	57.239	
10	SIDAMULIH	29.144	
JUMLAH		422.615	

2.2.1. Bidang Pendaftaran Penduduk Dan Informasi Kependudukan

Seiring dengan Pemekaran Daerah Otonomi baru kabupaten pangandaran yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten

pangandaran Pada saat itu Jumlah Penduduk adalah 426.171 Jiwa sedangkan hingga Tahun 2019 Jumlah Penduduk Kabupaten Pangandaran adalah sebanyak 422.516 jiwa.

Pada tahun 2014 Kabupaten Pangandaran sudah mempunyai Kode Wilayah Sendiri dan sudah bisa melaksanakan Tugas dan Fungsinya yaitu diantaranya Penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga melayani surat Pindah, Sampai Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Sudah menerbitkan KTP-el, KK dan KIA.

**PENGURUSAN E-KTP
KABUPATEN PANGANDARAN
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk yang Sudah Terekam Dalam E-KTP (jiwa)	Jumlah Penduduk yang Wajib Ber-KTP (Jiwa)	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	PARIGI	34.608	34.846	
2	CIJULANG	21.758	21.879	
3	CIMERAK	36.189	36.343	
4	CIGUGUR	16.780	16.878	
5	LANGKAPLANCAR	37.428	37.777	
6	MANGUNJAYA	24.647	24.846	
7	PADAHERANG	52.412	52.700	
8	KALIPUCANG	28.877	29.074	
9	PANGANDARAN	42.357	42.659	
10	SIDAMULIH	22.365	22.495	
JUMLAH		317.421	319.497	

Dilihat dari data tabel diatas menunjukan bahwa wajib KTP adalah 319.497 Jiwa dan yang telah direkam

sebanyak 317.421 Jiwa masih ada 2.076 Jiwa lagi yang belum terekam dalam KTP-el, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedang berupaya melalui jemput pelayanan keliling untuk menuntaskan perekaman KTP-el.

**PENGURUSAN KIA
KABUPATEN PANGANDARAN
PER 31 DESEMBER 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Anak yang Sudah Memiliki KIA	Jumlah Anak yang Seharusnya Memiliki KIA	Ket
1	2	3	4	5
1	PARIGI	2.015	10.320	
2	CIJULANG	2.603	6.124	
3	CIMERAK	5.753	12.120	
4	CIGUGUR	2.097	5.844	
5	LANGKAPLANCAR	3.370	13.383	
6	MANGUNJAYA	2.465	8.140	
7	PADAHERANG	4.121	16.412	
8	KALIPUCANG	3.037	9.561	
9	PANGANDARAN	3.746	14.585	
10	SIDAMULIH	1.469	6.652	
JUMLAH		30.676	103.141	

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 30.676 Anak, dan jumlah anak yang seharusnya memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 103.141 Anak, dan sebanyak 72.465 Anak belum memiliki Kartu Identitas Anak ini dikarenakan implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) ini masih baru di Semester dua Tahun 2018, dan sedang upaya dalam menuntaskan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Jemput Pelayanan Keliling ke Sekolah-Sekolah dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-KanaK (TK).

2.2.2. Bidang Pencatatan Sipil

Untuk Bidang Pencatatan Sipil Setelah Adanya Blangko Akta-Akta Pencatatan Sipil Sudah Bisa Menerbitkan Dokumen-Dokumen Pencatatan Sipil, Akta-Akta Pencatatan sipil sudah bisa diterbitkan. Sampai tahun 2019 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Sudah Menerbitkan Akta - Akta pencatatan sipil diantaranya akta kematian sebanyak 12.758 Akta, Akta kelahiran sebanyak 10.387 Akta, Akta Perkawinan 10 Akta, dan Akta Perceraian 1 akta.

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN KABUPATEN PANGANDARAN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun	Keterangan
1	PARIGI	11.156	11.508	
2	CIJULANG	6.617	6.838	
3	CIMERAK	13.032	13.395	
4	CIGUGUR	6.253	6.450	
5	LANGKAPLANCAR	14.257	14.758	
6	MANGUNJAYA	8.758	9.087	
7	PADAHERANG	17.706	18.332	
8	KALIPUCANG	10.234	10.643	
9	PANGANDARAN	15.696	16.218	
10	SIDAMULIH	7.187	7.404	
JUMLAH		110.896	114.633	



TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	n/a	n/a	B	B	B	BB	B	B	B	BB	-
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	n/a	n/a	28%	52%	73%	89%	93%	55.62%	n/a	89,75%	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

1. Masih perlu optimalisasi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Masih perlu peningkatan pada kualitas database administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Masih perlu peningkatan pada pelayanan administrasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang

disediakan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2021. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut :



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.288.986.040	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
2						Administrasi Keuangan					
3						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan per bulan	17 Orang	3.056.488.438	
4						Administrasi Umum					
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	2.635.380	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah waktu pengelolaan surat menyurat	12 Bulan	4.910.000	
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	316.778.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah rekening yang dibayar tiap bulan	7 Rekening	292.701.600	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 Unit	7.260.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah SDM pengemudi yang disediakan tiap bulan	9 Unit 1 Orang	33.200.000	
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	20.328.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah SDM kebersihan yang disediakan per bulan	1 Orang	17.400.000	
9	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu Penyediaan jasa pengamanan kantor	12 Bulan	20.328.000						
10	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang dan administrasi perkantoran	12 Bulan	46.464.000						
11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	60.197.500	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jenis jumlah alat tulis kantor yang dibeli	57 Jenis	64.951.305	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	45.375.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jenis jumlah barang yang dicetak dan digandakan	3 Jenis	3.900.000	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7.986.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jenis jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	5 Jenis	986.958	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	7.986.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Jenis	5.217.424	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	21.780.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah bahan bacaan yang disediakan per bulan	6 Eksemplar	4.810.000	
16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	14.520.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2 Jenis	9.924.000	
17	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	84.700.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	270.579.400	
18	Rapat Rapat Koordinasi dan	Disdukcapil Kab.	Jumlah waktu pelaksanaan rapat	12 Bulan	36.300.000						



	Konsultasi Ke Dalam Daerah	Pangandaran	koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah								
19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	12 Bulan	20.328.000						
20	Penyediaan Jasa Pengemudi	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah waktu penyediaan jasa pengemudi	12 Bulan	26.136.000						
21	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Pelayanan, Penerbitan, Sosialisasi, Pengelolaan, Peningkatan Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Tahun	1.549.884.160						
22						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mobilling Kependudukan yang diadakan	1 Unit	2.693.192.122	
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	439.559.120						
24	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	31 Unit	220.825.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	31 Unit	45.727.348	
25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	27 Unit	48.400.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Perekaman dan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	12 Unit 27 Unit	7.866.212.561	
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Unit	34.209.120	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Jumlah SDM keamanan yang disediakan per bulan	2 Unit 1 Orang	59.350.000	
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	9 Unit	78.408.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	9 Unit	91.959.268	
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	50 Unit	57.717.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	50 Unit	37.500.000	
29	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	25.200.000						
30						Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
31	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	60 Stel	25.200.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	60 Stel	18.295.200	
32	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang berkompeten	90%	60.000.000						
33	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah ASN yang mengikuti	20 Orang	11.900.000	
34	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	139.634.000						
35						Administrasi Keuangan					
36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	5 Dokumen	2.420.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun Jumlah SDM jasa	5 Dokumen 1 Orang	17.805.000	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

								administrasi dan teknis perkantoran Non ASN yang disediakan tiap bulan			
37	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	2 Dokumen	2.420.000	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	2 Dokumen	6.865.000	
38	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	2.420.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	910.000	
39						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
40	Penyusunan Program Dan Kegiatan SKPD	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun	5 Dokumen	45.738.000	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun	5 Dokumen	41.328.750	
41						Administrasi Umum					
42	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	12 Laporan	43.318.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	12 Laporan	33.000.000	
43	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi barang daerah	12 Laporan	43.318.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi barang daerah	12 Laporan	38.670.000	
44	Program Penataan Administrasi Identitas Kependudukan		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	94,50%	2.265.867.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
45						Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
46	Pelayanan Dokumen Identitas Penduduk	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah Identitas Kependudukan yang diterbitkan	317315 Dokumen	275.275.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Identitas Kependudukan yang diterbitkan	317315 Dokumen	1.038.962.950	
47	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan	7200 Dokumen	44.165.000	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan	7200 Dokumen	39.992.500	
48	Pendataan Penduduk	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Data Penduduk	2 Dokumen	47.795.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data penduduk	2 Dokumen	83.460.000	
49	Pengadaan Mobilling Kependudukan	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah Mobilling Kependudukan yang diadakan	1 Unit	1.200.000.000						
50	Pengadaan Perlengkapan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah pengadaan perlengkapan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	1 Paket	353.837.000						
51	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Cetak Kartu Keluarga da Tanda Tangan Elektronik	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah sarana dan prasarana alat cetak kartu keluarga dan tanda tangan elektronik yang diadakan	50 Unit	344.795.000						
52						Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				-	
53	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	84,73%	191.845.500	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
54						Pelayanan Pencatatan Sipil					



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

55	Pelayanan Akta Kelahiran	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	125285 Akta	87.725.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Jumlah Penerbitan Akta Kematian Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan dan Perkawinan yang disusun	125285 Akta 2760 Akta 19 Akta	105.415.000		
56	Pemeliharaan Arsip Catatan Sipil Secara Manual dan Digital	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah Arsip yang dipelihara	20000 Arsip	58.080.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang dipelihara	20000 Arsip	37.258.000		
57	Pelayanan Akta Kematian	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	2760 Akta	22.385.000							
58	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan dan Perkawinan yang disusun	19 Akta	23.655.500							
59	Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	90%	365.372.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
60						Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan						
61	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah perangkat SIAK yang dikelola	60 Unit	135.157.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pangandaran, Pananjung	Jumlah Perangkat SIAK yang dikelola Pelayanan, Penerbitan, Sosialisasi, Pengelolaan, Peningkatan Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan	60 Unit 12 Bulan	3.729.022.011		
62						Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						
63	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah Informasi Kependudukan yang dikelola	103 Dokumen	13.915.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah Informasi kependudukan yang dikelola	103 Dokumen	16.624.000		
64						Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan						
65	Pengembangan Aplikasi Layanan Kependudukan	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah Aplikasi yang dibuat	1 Aplikasi	36.300.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah aplikasi yang dibuat	1 Aplikasi	115.410.221		
66	Pengadaan Server Database Kependudukan	Disdukcapil Kab. Pangandaran	Jumlah server database kependudukan yang diadakan	1 Unit	180.000.000	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah server database kependudukan yang diadakan	1 Unit	218.095.149		
JUMLAH TOTAL					5.776.463.660	JUMLAH TOTAL					20.112.024.205	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran selama tahun 2021 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2021 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Penerapan KTP Elektronik berbasis NIK merupakan salah satu Program Strategis Nasional. Ada tiga Program Strategis Nasional yang pelaksanaannya telah disepakati bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Pemutakhiran data kependudukan di 497 Kabupaten/Kota, yang harus diselesaikan pada tahun 2010.
- b. Pemberian NIK kepada setiap penduduk, pada tahun 2010 di 329 Kabupaten/ Kotadan 2011 di 168 Kabupaten/ Kota.
- c. Penerapan KTP Elektronik pada tahun 2011 di 197 Kabupaten / Kota dan pada tahun 2012 di 300 Kabupaten/Kota.

Kegiatan program strategis tersebut saling bersinergi dalam kesatuan proses, dimulai dengan pemutakhiran data untuk mendapatkan data kependudukan yang valid. Selanjutnya, untuk mendapatkan NIK yang akurat disamping melalui pemutakhiran data perlu juga diverifikasi dengan sidik jari tangan penduduk. Sedangkan untuk menerapkan KTP Elektronik, mutlak diperlukan data penduduk yang valid dan telah memiliki NIK serta perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari tangan dan iris penduduk.

Penerapan e-KTP merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran dimana setiap penduduk hanya di perbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta.

Penerapan KTP Elektronik merupakan program nasional yang harus terlaksana dengan baik, karena merupakan program yang memerlukan pembiayaan yang besar tetapi manfaatnya juga sangat besar, baik bagi penduduk, bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan komitmen pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota beserta jajarannya dan penduduk untuk mensukseskan program dimaksud.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran selama Satu tahun yaitu :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB
2	Mewujudkan pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89%

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 beserta prognosisnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Rancangan Awal Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

Tabel V.6

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					20.112.024.205				22.123.226.626
2	12				20.112.024.205				22.123.226.626
2	12	01			14.727.784.374				16.200.562.811
2	12	01	2.01		41.328.750				45.461.625
2	12	01	2.01	02	41.328.750	PAD			45.461.625
2	12	01	2.02		3.082.068.438				3.390.275.282
2	12	01	2.02	01	3.056.488.438	PAD, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3.362.137.282
2	12	01	2.02	06	17.805.000	PAD			19.585.500
2	12	01	2.02	07	6.865.000	PAD			7.551.500
2	12	01	2.02	09	910.000	PAD			1.001.000
2	12	01	2.03		11.574.191.986				12.731.611.185



2	12	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu pengelolaan surat menyurat	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	12 Bulan	4.910.000	PAD			5.401.000
2	12	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar tiap bulan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	7 Rekening	292.701.600	PAD			321.971.760
2	12	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi barang daerah	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	12 Laporan	38.670.000	PAD			42.537.000
2	12	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah SDM pengemudi yang disediakan tiap bulan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	9 Unit 1 Orang	33.200.000	PAD			36.520.000
2	12	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	12 Laporan	33.000.000	PAD			36.300.000
2	12	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM kebersihan yang disediakan per bulan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	1 Orang	17.400.000	PAD			19.140.000
2	12	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	57 Jenis	64.951.305	PAD			71.446.436
2	12	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	3 Jenis	3.900.000	PAD			4.290.000
2	12	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	5 Jenis	986.958	PAD			1.085.654
2	12	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	12 Jenis	5.217.424	PAD			5.739.166
2	12	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan per bulan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	6 Eksemplar	4.810.000	PAD			5.291.000
2	12	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	2 Jenis	9.924.000	PAD			10.916.400
2	12	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	12 Bulan	270.579.400	PAD			297.637.340
2	12	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobilling Kependudukan yang diadakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	2.693.192.122	PAD, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			2.962.511.334



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

2	12	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	31 Unit	45.727.348	PAD			50.300.083
2	12	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Perekaman dan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Jumlah perlatan gedung kantor yang diadakan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	12 Unit 27 Unit	7.866.212.561	PAD, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			8.652.833.817
2	12	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Jumlah SDM kemandirian yang disediakan per bulan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	2 Unit 1 Orang	59.350.000	PAD			65.285.000
2	12	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	9 Unit	91.959.268	PAD			101.155.195
2	12	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	50 Unit	37.500.000	PAD			41.250.000
2	12	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.195.200				33.214.720
2	12	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	60 Stel	18.295.200	PAD			20.124.720
2	12	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Formal	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	20 Orang	11.900.000	PAD			13.090.000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.162.415.450				1.278.656.995
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1.162.415.450				1.278.656.995
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen data penduduk	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	83.460.000	PAD			91.806.000
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				-				-
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Identitas Kependudukan yang diterbitkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	317315 Dokumen	1.038.962.950	PAD			1.142.859.245
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7200 Dokumen	39.992.500	PAD			43.991.750
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				142.673.000				156.940.300
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				142.673.000				156.940.300



2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Arsip yang dipelihara	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20000 Arsip	37.258.000	PAD			40.983.800
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Jumlah Penerbitan Akta Kematian Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan dan Perkawinan yang disusun	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125285 Akta 2760 Akta 19 Akta	105.415.000	PAD			115.956.500
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				4.079.151.381				4.487.066.519
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				16.624.000				18.286.400
2	12	04	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Informasi kependudukan yang dikelola	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	103 Dokumen	16.624.000	PAD			18.286.400
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan				4.062.527.381				4.468.780.119
2	12	04	2.03	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Perangkat SIAK yang dikelola Pelayanan, Penerbitan, Sosialisasi, Pengelolaan, Peningkatan Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	60 Unit 12 Bulan	3.729.022.011	PAD DAK Non Fisik - Dana Yanminduk			4.101.924.212
2	12	04	2.03	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah aplikasi yang dibuat	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	1 Aplikasi	115.410.221	PAD			126.951.243
2	12	04	2.03	11	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah server database kependudukan yang diadakan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	1 Unit	218.095.149	PAD			239.904.664

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021

Rencana kerja program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rencana anggaran Rp.14,727,784,374 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran, Dana Transfer Umum – DAU, dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, yang diimplementasikan kedalam 3 (tujuh belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :*

A. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.41,328,750 yang diimplementasikan pada 1 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dengan rencana anggaran sebesar Rp.41,328,750 yang bersumber dari APBD Kab dengan target kinerja adalah Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun sebanyak 5 Dokumen.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp.3,082,068,438 yang diimplementasikan pada 4 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp.3,056,488,438 yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Dana Transfer Umum - DAU dengan target kinerja adalah Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan per bulan sebanyak 17 Orang.

- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan rencana anggaran sebesar Rp.17,805,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah 1.Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sebanyak 5 Dokumen 2.Jumlah SDM jasa administrasi dan teknis perkantoran Non ASN yang disediakan tiap bulan sebanyak 1 orang.
 - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran dengan rencana anggaran sebesar Rp.6,865,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun sebanyak 2 Dokumen.
 - 4) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan rencana anggaran sebesar Rp.910,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sebanyak 1 dokumen.
- C. Kegiatan Administrasi Umum dengan rencana anggaran sebesar Rp.11,574,191,986 yang diimplementasikan pada 19 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan rencana anggaran sebesar Rp.4,910,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah waktu pengelolaan surat menyurat selama 12 Bulan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan rencana anggaran sebesar Rp.292,701,600 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah rekening yang dibayar tiap bulan sebanyak 7 Rekening.

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.38,670,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi barang daerah sebanyak 12 Laporan
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan rencana anggaran sebesar Rp.33,200,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah 1.Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan sebanyak 9 Unit, 2.Jumlah SDM pengemudi yang disediakan tiap bulan sebanyak 1 orang.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp.33,000,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah sebanyak 12 Laporan.
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.17,400,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalahJumlah SDM kebersihan yang disediakan per bulan sebanyak 1 orang.
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.64,951,305 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jenis jumlah alat tulis kantor yang dibeli sebanyak 57 jenis.
- 8) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan rencana anggaran sebesar Rp.3,900,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jenis jumlah barang yang dicetak dan digandakan sebanyak 3 Jenis.

- 9) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.986,958 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jenis jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli sebanyak 5 jenis.
- 10) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan rencana anggaran sebesar Rp.5,217,424 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan sebanyak . 12 Jenis
- 11) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan dengan rencana anggaran sebesar Rp.4,810,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah bahan bacaan yang disediakan per bulan sebanyak 6 Eksemplar.
- 12) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan rencana anggaran sebesar Rp.9,924,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang disediakan sebanyak 2 jenis.
- 13) Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.270,579,400 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.
- 14) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan rencana anggaran sebesar Rp.2,693,192,122 yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan target kinerja adalah Jumlah Mobilling Kependudukan yang diadakan sebanyak 1 unit.

- 15) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.45,727,348 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sebanyak 31 Unit
- 16) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.7,866,212,561 yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan target kinerja adalah 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Perekaman dan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebanyak 12 Unit, 2. Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sebanyak 27 Unit.
- 17) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.59,350,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala sebanyak 2 unit, 2. Jumlah SDM keamanan yang disediakan per bulan sebanyak 1 orang
- 18) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan rencana anggaran sebesar Rp.91,959,268 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala sebanyak 9 Unit.
- 19) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.37,500,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara sebanyak 50 Unit.

D. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan rencana anggaran sebesar Rp. 30,195,200 yang diimplementasikan pada 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dengan rencana anggaran sebesar Rp.18,295,200 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah pakaian khusus hari- hari tertentu yang diadakan sebanyak 60 stel.
- 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan rencana anggaran sebesar Rp.11,900,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah ASN yang mengikuti sebanyak 20 Orang.

2. *Program Pendaftaran Penduduk dengan rencana anggaran sebesar Rp.1,162,415,450 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran, yang diimplementasikan kedalam 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :*

A. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan rencana anggaran sebesar Rp.1,162,415,450 yang diimplementasikan pada 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan rencana anggaran sebesar Rp.83,460,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah dokumen data penduduk sebanyak 2 Dokumen.
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan rencana anggaran sebesar Rp.1,038,962,950 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah Identitas Kependudukan yang diterbitkan sebanyak 317315 Dokumen.

- 3) Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan rencana anggaran sebesar Rp.39,992,500 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan sebanyak 7.200 Dokumen.

3. *Program Pencatatan Sipil dengan rencana anggaran sebesar Rp.4,079,151,381 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran, yang diimplementasikan kedalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :*

A. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan rencana anggaran sebesar Rp.142,673,000 yang diimplementasikan pada 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan rencana anggaran sebesar Rp.37,258,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah Arsip yang dipelihara 20.000 Arsip.
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dengan rencana anggaran sebesar Rp.105,415,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah 1. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran sebanyak 125285 Akta, 2. Jumlah Penerbitan Akta Kematian 2760 Akta, 3. Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan dan Perkawinan yang disusun 19 Akta.

4. *Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan rencana anggaran sebesar Rp.4,079,151,381 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - Yanminduk, yang diimplementasikan kedalam 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :*

- A. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan rencana anggaran sebesar Rp.16,624,000 yang diimplementasikan pada 1 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan rencana anggaran sebesar Rp.16,624,000 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah Informasi kependudukan yang dikelola sebanyak 103 Dokumen.
- B. Kegiatan Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dengan rencana anggaran sebesar Rp.4,062,527,381, yang diimplementasikan pada 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dengan rencana anggaran sebesar Rp.3,729,022,011 yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Yanminduk dengan target kinerja adalah 1. Jumlah Perangkat SIAK yang dikelola sebanyak 60 Unit, 2. Pelayanan, Penerbitan, Sosialisasi, Pengelolaan, Peningkatan Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan selama 12 Bulan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan rencana anggaran sebesar Rp.115,410,221 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah aplikasi yang dibuat sebanyak 1 Aplikasi.
 - 3) Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan dengan rencana anggaran sebesar Rp.218,095,149 yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan target kinerja adalah Jumlah server database kependudukan yang diadakan sebanyak 1 Unit.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah Kebijakan dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan Pembangunan, selanjutnya. yang nantinya akan dievaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan.

Selain dari pada itu dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan komitmen para pemangku kepentingan, dari seluruh masyarakat guna tercapainya pelaksanaan kegiatan dalam Tertib Administrasi Kependudukan yang tepat sasaran, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk memaksimalkan program dan kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dimasa yang akan datang dengan harapan adanya tambahan anggaran guna peningkatan pelayanan yang berkelanjutan melalui bimbingan lanjutan, pemberian stimulant modal, peralatan usaha, dan tempat usaha serta peningkatan akses pemasaran hasil usaha. Dengan

demikian akan menunjukan salah satu bentuk pelayanan yang sinergitas.

Akan tetapi dalam menentukan keberhasilan, selain adanya penambahan anggaran biaya tambahan atau kegiatan transisi juga ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat yang telah diberikan pelayanan atau semangat dan kualitas kerja para penyelenggara serta derajat jaringan kerja yang berhasil dibangun. Oleh karena itu prinsip penata kelolaan (*governance*) yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi sebagai rambu-rambu bagi setiap penanggung jawab dalam pelaksana program dan kegiatan.

Kiranya Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan/pedoman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sehingga dapat berhasil guna, bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Pangandaran, 31 Agustus 2020

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN



UKI, S.Sos., M.M
Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19700312 199803 2 004

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

Permendagri 13 Tahun 2006 / Renja PD					Permendagri 90 Tahun 2019						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil											Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil									Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu pengelolaan surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu pengelolaan surat menyurat	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar tiap bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar tiap bulan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM kebersihan yang disediakan per bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM kebersihan yang disediakan per bulan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah SDM keamanan yang disediakan per bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah SDM keamanan yang disediakan per bulan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan per bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan per bulan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah SDM jasa administrasi dan teknis perkantoran Non ASN yang disediakan tiap bulan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah SDM jasa administrasi dan teknis perkantoran Non ASN yang disediakan tiap bulan	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pengemudi	Jumlah SDM pengemudi yang disediakan tiap bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah SDM pengemudi yang disediakan tiap bulan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Pelayanan, Pemberitan, Sosialisasi, Pengelolaan, Peningkatan Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Pelayanan, Pemberitan, Sosialisasi, Pengelolaan, Peningkatan Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan					
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Permendagri 13 Tahun 2006 / Renja PD						Permendagri 90 Tahun 2019					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan ruah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan ruah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparaturnya				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparaturnya yang berkompeten				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Program Dan Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi barang daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi barang daerah	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Identitas Kependudukan		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan		
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Identitas Kependudukan	Pelayanan Dokumen Identitas Penduduk	Jumlah Identitas Kependudukan yang diterbitkan	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Identitas Kependudukan yang diterbitkan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Identitas Kependudukan	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Identitas Kependudukan	Pendataan Penduduk	Jumlah dokumen Data Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Data Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Identitas Kependudukan	Pengadaan Mobilling Kependudukan	Jumlah Mobilling Kependudukan yang diadakan	Pengadaan Mobilling Kependudukan	Jumlah Mobilling Kependudukan yang diadakan					
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Identitas Kependudukan	Pengadaan Perlengkapan Perekaman dan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	Jumlah pengadaan perlengkapan perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	Pengadaan Perlengkapan Perekaman dan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	Jumlah pengadaan perlengkapan perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik					
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		

Permendagri 13 Tahun 2006 / Renja PD					Permendagri 90 Tahun 2019						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Pemeliharaan Arsip Catatan Sipil Secara Manual dan Digital	Jumlah Arsip yang dipelihara	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Arsip yang dipelihara	Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Pelayanan Akta Kematian	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan dan Perkawinan yang disusun	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan dan Perkawinan yang disusun	Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah perangkat SIAK yang dikelola	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah perangkat SIAK yang dikelola	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Informasi Kependudukan yang dikelola	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Informasi Kependudukan yang dikelola	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pengembangan Aplikasi Layanan Kependudukan	Jumlah Aplikasi yang dibuat	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Aplikasi yang dibuat	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Kependudukan dan Catatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pengadaan Server Database Kependudukan	Jumlah server database kependudukan yang diadakan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat DanDapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah server database kependudukan yang diadakan	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			